

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS PEMBAGIAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA
DI KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG)**

Disusun dan Diusulkan Oleh:

SAHRI ANI

Nomor Stambuk: 10561 04810 13



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**IMPLEMETASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS
PEMBAGIAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA DI KECAMATAN DONRI-
DONRI KABUPATEN SOPPENG)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

SAHRI ANI

Nomor Stambuk : 105610481013

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng).

Nama Mahasiswa : Sahri Ani

Nomor Stambuk : 105610481013

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

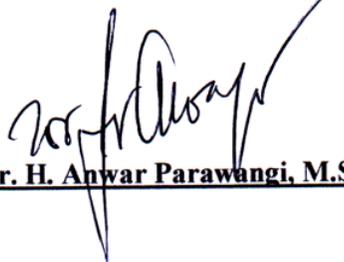
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II

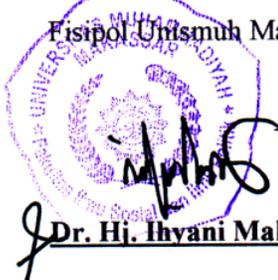


Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0093/FSP/A.I-VIII/1/38/2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.!) daam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



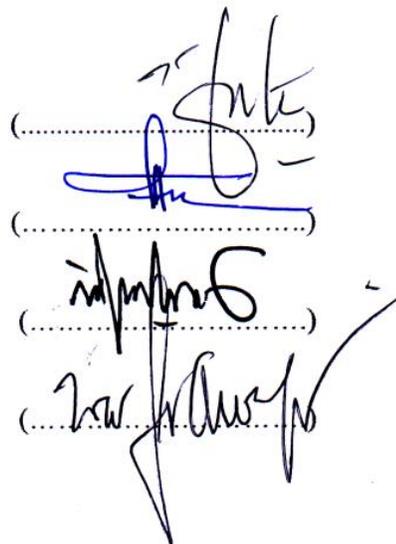
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Dr. Anwar Parawangi, M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahri Ani

Nomor Stambuk : 10561 04810 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 04 Januari 2018

Yang menyatakan,

Sahri Ani

ABSTRAK

SAHRI ANI. Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng). (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Anwar Parawangi).

Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera) merupakan sebuah program kebijakan yang bertujuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga kurang mampu. Bagi keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini, akan mendapatkan kartu Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk keuangan digital dengan pemberian *simcard* yang berisi *e-money* dalam bentuk simpanan giro pos. Setiap keluarga mendapat dana sejumlah Rp.200.000 per bulan dan diisi setiap 2 bulan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumnya telah ditentukan.

Pemerintah daerah telah berupaya dalam mensosialisasikan Program Kartu Keluarga sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman dan mengimplementasikan program Kartu Keluarga Sejahtera kepada masyarakat. Pendataan yang dilakukan dalam program Kartu Keluarga Sejahtera masih kurang efektif karena masih terpat kesalahan yang ditemukan dikarenakan mereka masih menggunakan data lama, sehingga penerima KKS ini belum merata dikarenakan pendataannya yang kurang efektif. Pemerintah setempat telah berupaya melakukan pengawasan dengan baik agar program bantuan sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima.

Kata Kunci : Implementasi Pembagian KKS

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sembah sujud dan kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda Tercinta, terimakasih atas segala pengorbanan, kesabaran, doa, dukungan dan semangat yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Terimakasih juga kepada kakak dan adik tercinta, dan seluruh keluarga besarku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada keluargaku Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang senantiasa mendoakan sehingga segala urusan penulis selama ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng serta masyarakat yang telah membantu dalam pengambilan data, penulis mengucapkan banyak terimakasih.
7. Terimakasih kepada Nilam Cahya dan Masita Sunarni yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai sampai saat ini.
8. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 khususnya kelas 8A serta teman-teman dan kakanda di HUMANIERA yang tak sempat penulis sebut satu persatu terimakasih karena telah mengisi hari-hari penulis dengan suka dan duka sehingga penulis mengerti arti sebuah kebersamaan.

9. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca maupun pihak lain. Akhir kata semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

WassalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 04 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kebijakan Publik	11
1. Pengertian Kebijakan Publik	11
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik	13
B. Konsep Implementasi Kebijakan	15
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	15
2. Tahap-tahap Implementasi	18
3. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan	20
4. Model Implementasi Kebijakan	22
C. Konsep Kemiskinan	33
1. Pengertian Kemiskinan	33
2. Penyebab Kemiskinan.....	36
3. Karakteristik Kemiskinan.....	37
D. Konsep Program Kartu Keluarga Sejahtera	38
E. Kerangka Pikir	40
F. Fokus Penelitian	41
G. Deskripsi Fokus Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	43
C. Sumber Data	43

D. Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan.....	54
C. Kebijakan Program KKS di Kecamatan Donri-donri	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
Tabel 3.1	Tabel Informan	44
Tabel 3.2	Informan wawancara	45
Tabel 4.1	Luas wilayah	51
Tabel 4.2	Jumlah penduduk	52
Tabel 4.3	Jumlah Tahapan Keluarga sejahtera Kabupaten Soppeng	63
Tabel 4.4	Tabel Jumlah Penerima KKS di Kabupaten Soppeng	64
Tabel 4.5	Jumlah Tahapan keluarga sejahtera Kecamatan Donri-donri	65
Tabel 4.6	Tabel Jumlah Penerima KKS di Kecamatan Donri-donri	66

BAB I

PENDAHILUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap perumusan suatu kebijakan (program) selalu diiringi dengan suatu implementasi. Betapapun baiknya suatu program tanpa implementasi yang benar dan baik maka tidak akan banyak berarti. Suatu program hanyalah rencana bagus di atas kertas kalau tidak dapat di implementasikan dengan baik dan benar. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Wildavsky (Hassel Nogi, 2003:17) mengartikan implementasi sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sasaran-sasaran tindakan dalam mencapai tujuan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Mazmanian dan Sabatier (Fadilla Putra, 2003:84) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Dari beberapa pemahaman yang dikemukakan di atas terlihat dengan jelas bahwa implementasi merupakan suatu

rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana yang dihaparkan

Layaknya implementasi kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, berbagai permasalahan atau fenomena yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari bantuan-bantuan yang yang diluncurkan langsung oleh pemerintah pusat kemudian ke pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), KPS (Kartu Perlindungan Sosial), PKH (Program Keluarga Harapan) dan lain-lain sebagainya. Namun perogran tersebut belum sepenuhnya menyentuh kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya dikarenakan belum efektifnya kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan perogram tersebut sehingga tidak tepat sasaran.

Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan pada masyarakat adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia

merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus (Suharto, 2009: 131). Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 16 kriteria keluarga miskin, (2005) yakni: 1). Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8 M² per orang; 2). Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau lantai kayuberkualitas rendah/banbu; 3). Hidup dalam rumah dengan dinding terbuat dari kayuberkualitas rendah/bambu/rumbia/tembok tanpa diplaster; 4). Hidup dalam rumah yang tidak di lengkapi dengan WC/bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5). Hidup dalam rumah tanpa listrik; 6). Tidak mendapatkan fasilitas air bersih/sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; 7). Menggunakan kayu bakar, aranga atau minyak tanah untuk memasak; 8). Mengonsumsi daging atau susu seminggu sekali; 9). Belanja satu set pakaian baru setahun sekali; 10). Makan hanya sekali atau dua kali sehari; 11). Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada puskesmas terdekat; 12). Pendapatan keluarga kurang dari Rp. 600.000,- perbulan; 13). Pendidikan kepala keluarga hanya setingkat Sekolah Dasar; 14). Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (kendaraan, emas, ternak dll); 15). Mempekerjakan anak di bawah umur; 16). Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

Sementara itu, kriteria kemiskinan versi BKKBN meliputi : 1). Anggota keluarga belum melaksanakan ibadah menurut agamanya; 2). Seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari; 3). Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja,sekolah, dan bepergian;4). Bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah;5). Bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan; 6). Anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah agamanya secara teratur; 7). Keluarga tidak makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu; 8). Setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun; 9). Tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni; 10). Ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir; 11).Tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap; 12).Ada anggota keluarga berumur 10–60 tahun yang tidak bisa baca-tulis; 13).Ada anak berumur 5–15 tahun yang tidak bersekolah; 14).Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai kontrasepsi; 15).Keluarga dapat meningkatkan pengetahuan agamanya; 16).Sebagian penghasilan keluarga ditabung; 17).Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi; 18).Keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat; 19).Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan; 20). Keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah; 21). Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal; 22).Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial; dan 23).Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal.

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 255 juta jiwa, serta dengan anekaragam budaya dan kelas sosial (BPS: 2015), membuat Indonesia rentan terhadap masalah ekonomi yang berdampak langsung pada kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,59 juta jiwa yang berarti sekitar 11,22 persen penduduk Indonesia secara keseluruhan pada Maret 2015 (BPS: 2015). Sedangkan di Sulawesi Selatan jumlah penduduk miskin mencapai 28513,60 ribu orang atau 11,13 persen (BPS: 2015). Sementara di Kabupaten Soppeng sendiri jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 21,30 persen dari 225,512 jiwa (BPS: 2013).

Salah satu amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka meminimalisir permasalahan kesejahteraan di Indonesia, pemerintah melalui kementerian sosial menggunakan berbagai program untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan tersebut berupa: a). Bantuan Langsung Tunai (BLT); b). Bantuan Rakyat Miskin (Raskin); c). Kartu keluarga sejahtera (KKS); d). Kartu Indonesia Sehat (KIS); e). Pendidikan gratis; f). Kesehatan gratis; g). Kartu Indonesia pintar. Karena merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

Upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial tersebut antara lain: a). Program simpanan keluarga sejahtera; b). Program Indonesia pintar; c). Program Indonesia sehat.

Selain kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera ini adalah kartu yang didalamnya ada Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang merupakan uang digital dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo, dan panti-panti sosial lainnya. Kartu Keluarga Sejahtera merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang di sertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan Digital (LKD) yang merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kartu itu merupakan program pemerintahan Jokowi – JK.

Sebelumnya, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S) seperti KPS. Dengan KPS tersebut, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti: raskin dan bantuan siswa miskin (BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada tahun 2014,

Kartu Perlindungan Sosial tersebut di ganti dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS). (detik.com)

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu sendiri merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dengan pemberian dana stimulasi antara lain melalui Kartu Keluarga Sejahtera sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Setiap kepala keluarga atau rumah tangga pemegang KKS akan mendapatkan bantuan non tunai sebesar RP. 200.000 perbulan. Kartu ini diisi setiap dua bulan, di sertai pemberian satu sim card. Sim card ini dapat berfungsi ganda yakni selain sebagai nomor Hand Phon juga sekaligus menjadi nomor rekening bagi peserta Keluarga Sejahtera dalam penyalur dana simpanan.

Khusus di Kabupaten Soppeng sendiri, Kartu Keluarga Sejahtera ini *launching* pada tanggal 18 April 2016. Adapun jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera pada tahun 2016 Kabupaten Soppeng yakni sebanyak 8538 kartu KKS dengan total bantuan sebesar Rp. 31.420.800.000, yang akan dibagi ke 8 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Donri-Donri terdapat 1657 KKS yang tersebar ke 9 Desa/kelurahan. (Dinas sosial Kabupaten Soppeng)

Berdasarkan data tersebut di atas yang mendorong Dinas Sosial Kabupaten Soppeng untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data dan melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima program simpanan keluarga sejahtera sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Namun yang terjadi dilapangan terdapat berbagai permasalahan seperti, adanya ketidak sesuaian data penerima dengan yang terdapat pada kartu, yakni yang namanya terdaftar sebagai penerima tetapi tidak berdomisili di Desa tersebut bahkan sudah ada yang meninggal, serta pembagian kartu yang belum tepat sasaran dan belum merata. Sehingga penerimaannya sampai kepada masyarakat dinilai belum efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng)”*

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka lebih mempertajam tulisan ini, maka, penulis merumuskan sebuah pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana pendataan penetapan penerima pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diketahui oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?
2. Untuk mengetahui pendataan penetapan penerima pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?
3. Untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?

4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu sosial, khususnya pada bidang ilmu administrasi Negara dan ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis
 - a. Merupakan media bagi penulis untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran dalam rangka turut memberikan kontibusi pemikiran tentang Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng).

- b. Merupakan investasi berharga bagi penulis kelak apabila akan berkiprah dalam kehidupan sosial dan politik.
- c. Sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Konsep dasar tentang kebijakan publik sebenarnya bermula dari bangsa Yunani dan Romawi yang mengambil konsep *publik* dan *privat*. Bangsa Romawi mendefinisikan kedua istilah tersebut dalam term *res publica* dan *res priva*. Gagasan *publik* dan *privat* pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah *konion* (yang dapat diartikan publik) dan *idion* (yang bisa diartikan privat). Kemudian sejarah studi kebijakan publik sudah dapat dirasakan keberadaannya sejak abad ke 18 SM pada masa pemerintahan Babilonia yang disebut dengan Kode Hammurabi. Kode ini mengekspresikan keinginan membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil pada masa ketika Babilonia mengalami transisi dari Negara kota kecil menjadi wilayah yang luas (Fermana, 2009 : 30-31).

Carl Fredirch (Winarno, 2002:16) mengartikan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Pengertian Kebijakan menurut W.I Jenkins(Wahab, 2012:15) sebagai berikut : kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan

yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Eston (tangkilisan, 2003:2) Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Namun untuk memahami berbagai defenisi kebijakan publik, ada baiknya jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik seperti yang diutarakan oleh Young dan Quinn (2002) dalam Suharto (2005 : 44-45) yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mewakili kewenangan hukum, politis dan *financial* untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat kegiatan yang berorientasi kepada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Sedangkan menurut James Anderson (Agustino, 2016:17) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut : Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2012:20), ciri-ciri kebijakan publik yaitu :

- a. Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku

atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan.

- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang – bidang tertentu.
- d. Kebijakan Publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan publik mungkin mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

Sedangkan menurut Anderson (Abidin, 2012:22) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.

- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. namun, ia berkaitan dengan kebijakan dalam masyarakat, berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan proses kedua di dalam perumusan kebijakan setelah melalui tahapan formulasi kebijakan. Dan di dalam pelaksanaannya terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Nugroho (2014 : 243) merumuskannya menjadi tiga langkah dengan tujuan agar implementasi akan berhasil sebelum mulai mengimplementasikannya. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu: (1) Penerimaan kebijakan. Pemahaman *public* bahwa kebijakan adalah “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik – bukan sebagai keistimewaan. (2) Adopsi

kebijakan. Publik setuju dan mendukung kebijakan sebagai “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik – bukan sebagai keistimewaan. (3) Kesiapan Strategis. Publik siap untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi pengimplementasi utama; seperti yang anda ketahui tanggung jawabnya untuk menjalankan keeluasaan kebijakan.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Agustino, 2016:126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Tahap-Tahap Implementasi

Tahap implementasi menurut Bernadus Luankali (Dewi, 2016: 159-160).

Adapun bentuk tahap Implementasi sebagai berikut:

- a. Implementasi strategi (praimplementasi), meliputi:
 1. Menyesuaikan struktur dengan strategi
 2. Melembagakan strategi
 3. Mengoperasikan strategi

4. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
- b. Pengorganisasian (organizing), meliputi:
1. Desain organisasi dan struktur organisasi
 2. Integrasi dan koordinasi
 3. Perekrutan dan penempatan sumberdaya manusia
 4. Hak, wewenang dan kewajiban
 5. Pendelegasian (sentralisasi atau desentralisasi)
 6. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumberdaya manusia
 7. Budaya organisasi
- c. Penggerakan dan kepemimpinan, meliputi:
1. Efektivitas kepemimpinan
 2. Motivasi
 3. Etika
 4. Mutu
 5. *Teamwork*
 6. Komunikasi organisasi
 7. Negosiasi
- d. Pengendalian, meliputi:
1. Desain pengendalian
 2. Sistem informasi dan manajemen dan monitoring
 3. Pengendalian anggaran/ keuangan
 4. Audit

3. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Faktor penentu implementasi kebijakan menurut Leo Agustino (2016: 155-162), yaitu sebagai berikut:

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.

Dalam hal ini, faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimat. Apabila publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan.

- b. Kesadaran untuk menerima kebijakan.

Bermain dalam ranah kesadaran publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah *mindset* warga.

- c. Ada tidaknya sanksi hukum.

Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan (kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya.

- d. Kepentingan pribadi atau kelompok.

Subjek kebijakan (individu atau kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.

- e. Bertentangan dengan nilai yang ada.

Implementasi kebijakan pun berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada pada suatu daerah.

- f. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi.

Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak.

- g. Wujudnya kepatuhan selektif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakn lain.

- h. Waktu.

Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang pada awalnya ditolak dan dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

- i. Sosialisasi.

Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan

yang diformulasikannya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

- j. Koordinasi antar-lembaga atau antar-organisasi.

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan atau *stakeholder*. Oleh karena itu, koordinasi merupakan hal penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan.

4. Model implementasi kebijakan

a). George C. Edward III

Model implementasi kebijakan Edward III (Agustino,2016: 136-141) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor yang dimaksud antara lain meliputi :

- a. Variabel Komunikasi (communication).

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). Menurut Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi, pertama transformasi (transmission), yang menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Kedua adalah dimensi kejelasan

(clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ketiga adalah dimensi konsistensi (consistency) menghendaki agar dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan), karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana lapangan.

b. Variabel Sumber daya (Resources)

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya terdiri dari empat variabel, yaitu:

1. Sumber daya Manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Edward III menegaskan bahwa "Probably the most essential resources in implementing policy is staff". Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Oleh karena itu, sumberdaya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

2. Sumber daya Anggaran, yang dimaksud adalah dana (anggaran) yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksana kebijakan. Sumberdaya keuangan (anggaran) akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian tujuan. Maka dari itu, perlu ditetapkan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas.
 3. Sumberdaya Peralatan (facility), merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
 4. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan, yang dimaksud adalah informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang digunakan untuk membuat keputusan sendiri dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi kewangannya.
- c. Variabel Disposisi (Disposition)

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh

tak acuh, atau menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari seorang implementor agar kebijakan tersebut mampu menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri. Pada akhirnya, intensitas disposisi implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

d. Variabel Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

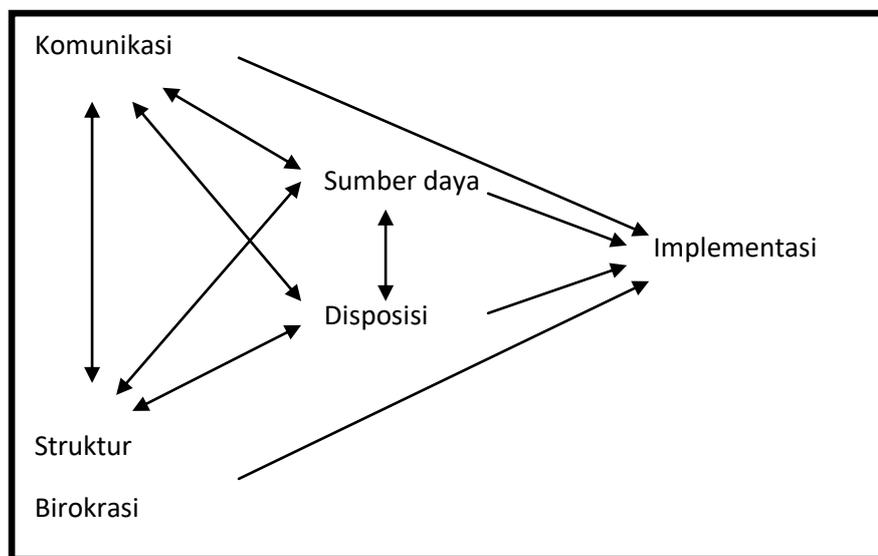
Menurut Edward III kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah :

1. Membuat *standard operating procedures* (SOP) yang lebih fleksibel; SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja

yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang berkompeten dan kapabel.

Gambar 1: Model Implementasi Edward III



Sumber: Edward III (148)

b). Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Sabatier dan Mazmanian (Suratman 2017: 100) mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutnya pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak membantu untuk memahami proses pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi proses itu menjadi serangkaian bagian yang tidak realistis dan artifisial. Karena itu, dari sudut pandang ini implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Sabatier dan Mazmanian mendukung sintesis gagasan teoritis *top-down* dan *bottom-up* menjadi enam syarat yang mencukupi dan mesti ada untuk implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan yang tidak dinyatakan secara legal. Enam syarat yang dimaksud adalah:

- a. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya
- b. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
- c. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
- d. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
- e. Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di legislatif dan eksekutif.
- f. Perubahan dalam kondisi sosio ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Paul A. Sabatier (Suratman 2017: 99), memodifikasi model mereka, berdasarkan riset di Eropa dan Amerika. Mereka mengembangkan kerangka implementasi kebijakan, mengidentifikasi tiga variabel bebas (independen variabel) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: variabel (1) mudah atau sulitnya mengendalikan masalah yang dihadapi meliputi indikator (i) kesukaran teknis, (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran, (iii) persentas kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (iv) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel (2) kemampuan kebijakan untuk

mensistematisasi proses implementasi dengan indikator (i) kejelasan dan konsistensi tujuan, (ii) ketepatan alokasi sumber daya, (iii) keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana, (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana, (v) rekrutmen pejabat pelaksana, dan (vi) akses pihak luar secara formal. Variabel (3) pengaruh langsung variabel politik/kepeningan terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan, meliputi indikator (i) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, (ii) dukungan politik, (iii) sikap dan sumberdaya yang dimiliki kelompok, (iv) dukungan dari pejabat atasan, dan (v) komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

1. Variabel Independen

Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang di kehendaki.

2. Variabel Intervening

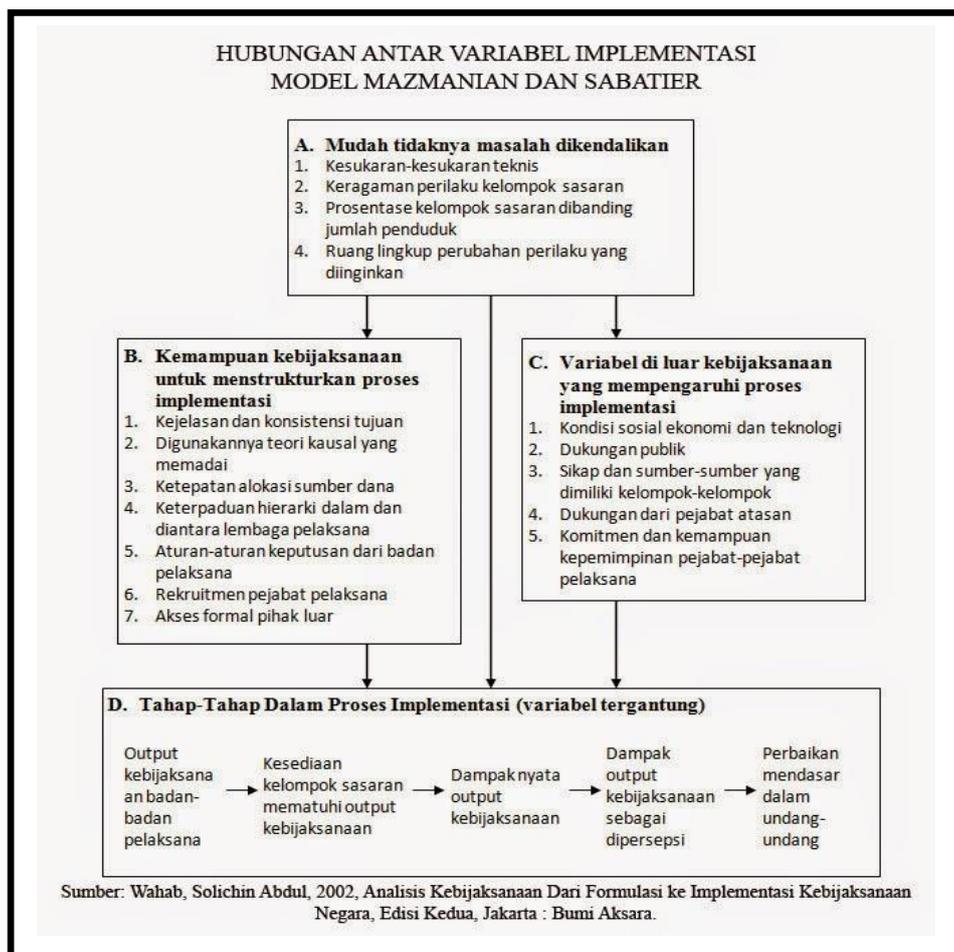
Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik,

sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses imlementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari; 1). Pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentukdisusunnya kebijakan peleksana; 2).Kepatuhan objek; 3).Hasil nyata; 4).Penerinaan atas hasil nyata; 5).Tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang di buat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Gambar 2: Model implementasiMazmanian dan Sabatier



Model Sabatier dan Mazmanian mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menghambat ataupun mendorong keberhasilan implementasi, yang mencakup karakteristik masalah, daya dukung peraturan, faktor non peraturan. Model ini memandang implementasi sebagai *output* dan *outcomes*. Model ini berusaha mengukur keberhasilan implementasi dari segi kesesuaian *output* kebijakan dan kesesuaian dampak aktual kebijakan. Keunggulan model ini adalah kompleksitas dan kejelasan pemetaan variabel-variabel implementasi sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang sangat luas tentang mengapa output dan dampak implementasi kebijakan bervariasi dari satu ke lain kebijakan atau dari satu ke lain lokasi.

c). Model Soren C. Winter

Model lain yang menarik yang juga termasuk dalam kategori generasi ketiga ini dan mendapat perhatian dari banyak ahli adalah *integrated implementation model* yang dikembangkan oleh Winter (Suratman 2017:142). Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai *model integrated*. Model *integrated* menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antar proses politik dan administrasi.

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi design kebijakan yang pada dasarnya lahir atau ditentukan oleh formulasi kebijakan itu sendiri. Hal lain yang juga berpengaruh adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat. Suatu kebijakan bisa jadi akan sangat berpengaruh dengan lingkungan dimana kebijakan itu

dijalankan. Sementara itu pula menurut Winter, implementasi itu sendiri berkaitan dengan perilaku antara organisasi terkait, perilaku birokrasi terdepan sebagai pelaksana kebijakan serta berhubungan dengan perilaku kelompok sasaran kebijakan.

Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perilaku hubungan antar organisasi.

Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hal yang optimal, jarang berlangsung dalam kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum kedalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan.

Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah satu cara di antaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam satu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu. Tingkat implementasi dapat ditempuh pada organisasi formal, sementara administrasi pemerintah dapat diterapkan melalui hasil kebijakan.

2. Perilaku birokrat tingkat bawah.

Dimensinya adalah diskreasi. Hal aktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrat level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai

kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi).

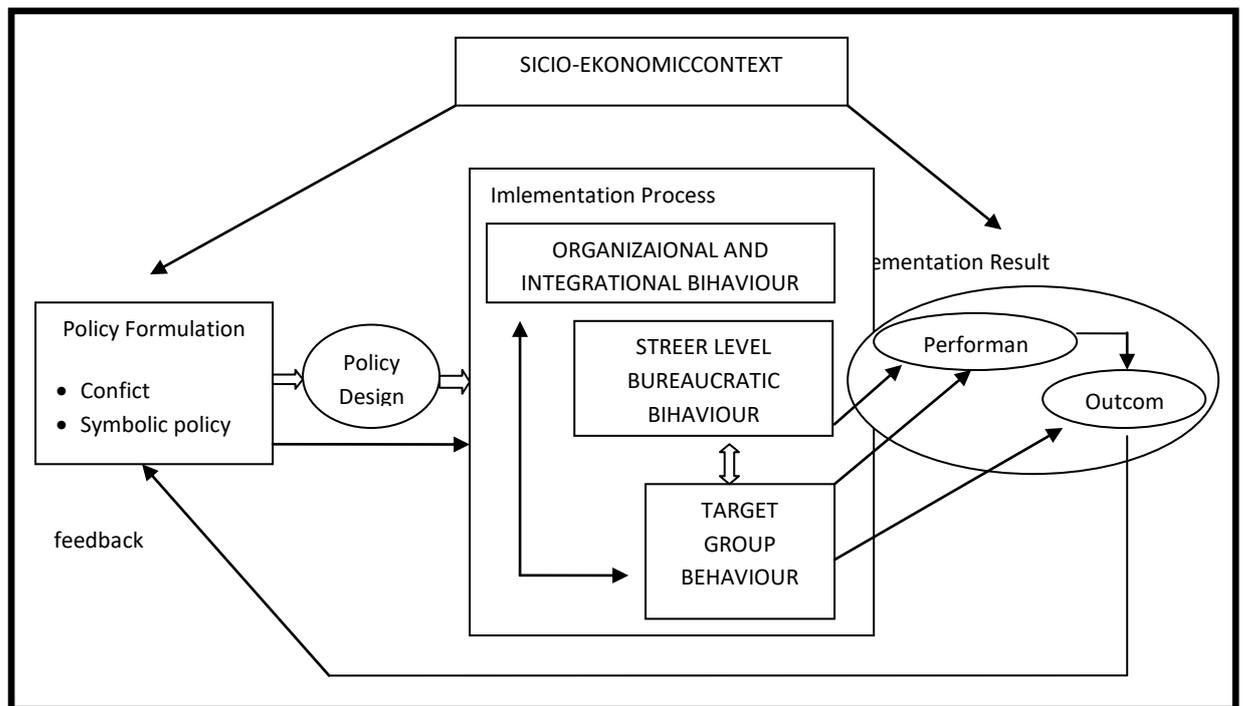
Peerja level bawah ini pada prinsipnya mempunyai pilihan pada hasil mana yang harus dicapai, dan bagaimana cara melakukannya. Demikian halnya dengan tokoh masyarakat, lembaga adat konselor dan semacamnya, secara rutin berhubungan dengan birokrasi level bawah. Mereka ini mengabdikan diri sebagai warga negara yang membantu menciptakan dan melakukan pelayanan publik berdasarkan norma.

3. Perilaku kelompok sasaran.

Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan

Variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif (Winter (Suratman:2017)). Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipan yakni mendukung atau menolak.

Gambar 3: Model Implementasi Winter



Sumber: Suratman (2017:142)

Tingkat kegagalan suatu implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Berdasarkan model implementasi kebijakan Winter di atas, maka kelebihan yang dimiliki adalah kemampuan mengintegrasikan dan menyederhanakan beberapa model implementasi menjadi suatu model yang tidak rumit terutama pada jaringan organisasi. Kelemahannya adalah tidak menjelaskan lebih rinci pengertian perilaku dan mengidentifikasi faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan.

C. Konsep kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam

konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos 2002: 3). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum. Menurut Smeru (Sjafari, 2014: 16), secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Agus Sjafari (2014: 12), paradigma penanggulangan kemiskinan pada saat ini adalah bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan. Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi, dan program yang tepat. Diperlukan pula sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai obyek, tetapi subyek.

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks (Suharto dkk, 2004). Menurut David Cox (Sjafari, 2014: 17) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Di negara-negara berkembang seringkali orang yang miskin semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan akibat rendahnya pembangunan, peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan, dan akibat kecepatan pertumbuhan perkotaan.
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan ini dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Menurut Smeru (Sjafari, 2014:17-18), kemiskinan memiliki berbagai dimensi:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

2. Penyebab Kemiskinan

Todaro (2006) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita.

Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita, dan tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita.

Penyebab kemiskinan terjadi karena mereka tidak memiliki faktor produksi sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyaknya diantara mereka yang tidak memiliki fasilitas dan diantara mereka berusia relatif muda dengan

tidak mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai. Kemiskinan juga disebabkan oleh perilaku masyarakat yang malas, tidak mau bekerja keras, sedangkan kondisi alamnya yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Terlebih lagi jika pemerintahannya melakukan perilaku yang merugikan negaranya sendiri seperti korupsi karena dengan adanya pemerintahan yang korupsi maka tidak terjadi sebuah pemerataan kekayaan didalam negara itu sendiri (Supriatna 2004).

3. Karakteristik Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur melalui garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhandasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang yang dikatakan miskin jika dipandang dari sudut konsumsi, Moeljarto (Supriatna 2004). Apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya maka seseorang tersebut termasuk dalam kategori kemiskinan.

Perhitungan garis kemiskinandalam masyarakat adalah yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut besar dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makan dan non makan. Sedangkan menurut *World Bank* penetapan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* USD \$2 per orang per hari, menurut BPS (2016). Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara

berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

D. Konsep Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

a) Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera

KKS adalah kepanjangan dari Kartu Keluarga Sejahtera yaitu merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif..

Untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial, pemerintah memutuskan untuk memberikan dalam bentuk simpanan. Alasan pemberian dalam bentuk simpanan adalah:

1. Simpanan/tabungan merupakan bentuk kegiatan produktif
2. Simpanan/tabungan merupakan bagian dari strategi nasional keuangan inklusif
3. Perbaikan dari program BLSM 2013 yang sekedar membagikan uang tunai
4. Mengurangi antrian

b) Fungsi Kartu Keluarga Sejahtera

KKS ini berfungsi sebagai penanda bahwa si pemegang kartu ini berhak menerima bantuan uang dari pemerintah. Si pemilik KKS akan diberikan SIM Card yang bisa dipasang di handphone untuk mengecek saldo. Fungsi SIM Card ini mirip dengan rekening bank. Untuk mengambil uang bantuan dari pemerintah

tersebut, bisa datang ke kantor pos terdekat dengan menunjukkan nomor SIM Card tersebut. Layanan ini biasa disebut e-money atau layanan keuangan digital, atau dengan cara bisa melihat penyalurannya melalui aplikasi *141*6# dari telepon genggam mereka.

a. Kategori Penerima

Rumah tangga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) , meliputi gelandangan, penghuni panti asuhan, panti jompo.

b. Pencairan Dana

Dana bantuan Rp. 6,4 triliun dari bantuan sosial kementerian sosial, yang dimana setiap keluarga mendapatkan bantuan Rp. 200 per bulan yang akan diisi setiap 2 bulan. Untuk pencairan melewati via Giropos. Adapun syarat untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai berikut :

1. Datang ke kantor Pos membawa KPS. Bagi mereka yang tidak memiliki KPS lagi karena hilang, maka bisa dengan cara menyertakan identitas lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan atau surat keterangan lain dari kelurahan (sesuai domisili) sebagaimana yang pernah dilakukan pada waktu pembuatan KPS.
2. Bagi mereka yang tidak lagi memiliki KPS dan atau baru menyertakan data-data lain pengganti KPS maka proses pengecekan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi mohon untuk bersabar karena proses pengecekan harus dilakukan

secara komprehensif guna menghindari kerangkapan data atau kesalahan pendataan lainnya.

3. Setelah KPS diserahkan dan telah di verifikasi oleh petugas kantor Pos, maka selanjutnya warga akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta dengan Sim Card (kartu chip telpon) uang elektronik. Jadi pastikan Anda memiliki telpon selular guna mengecek saldo yang nantinya dikirimkan melalui pesan singkat (SMS).
4. Setelah semua data telah di verifikasi keabsahannya, maka selanjutnya petugas akan memberikan tanda bukti serah terima yang harus ditanda tangani oleh penerima kartu yang bersangkutan beserta dengan KKS baru.

E. Kerangka Pikir

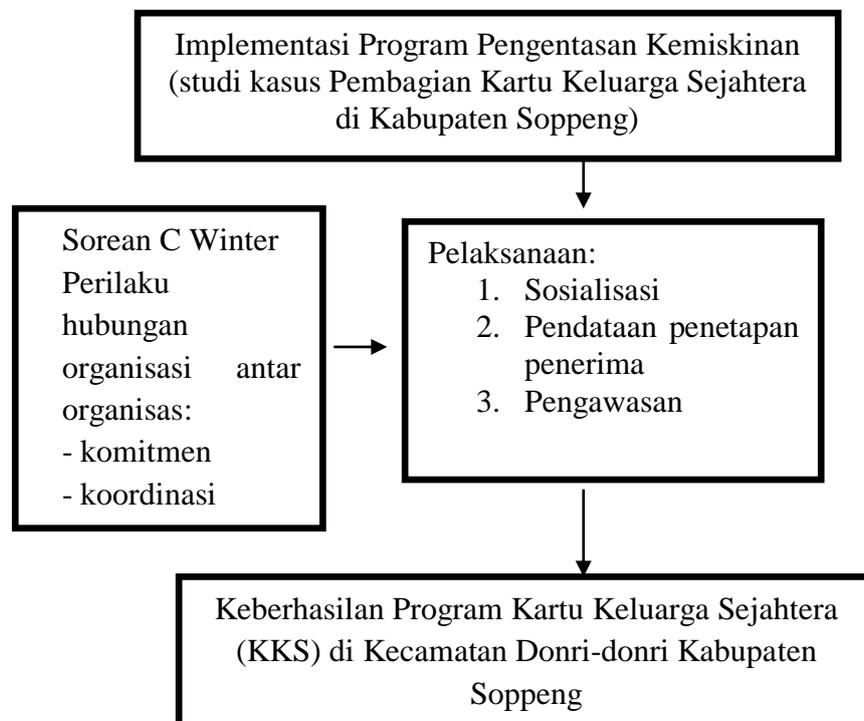
Implementasi program pengentasan kemiskinan merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana yang dihaparkan. Kemiskinan ini sendiri merupakan fenomena sosial struktural yang berdampak krusial terhadap keberhasilan pembangunan (indeks pembangunan manusia) dan memiliki dampak yang sangat nyata dimasyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai padapemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, yang mengakibatkan rendahnya sumberdayamanusia.

Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah mempunyai banyak program yang bermuara kepada masyarakat miskin salah satunya ialah

Program Kartu Keluarga Sejahtera yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu agar tercipta masyarakat yang sejahtera, sehingga perlu adanya Implementasi yang baik dan benar, agar cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima kartu tersebut.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini terdapat gambaran mengenai bagan kerangka pikir, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4 : Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial di lapangan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng)*.

G. Deskripsi Fokus

1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kartu tersebut merupakan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah publik untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan itu sendiri.
3. Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk hidup yang layak.
4. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnyadalam sebuah kelompok atau masyarakat
5. Pendataan berarti pengumpulan data atau pencarian data
6. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut
7. Perilaku hubungan antar organisasi ialah perilaku hubungan antar kelompok dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan selama kurang lebih dua bulan yaitu mulai 15 Juni sampai 12 Agustus 2017, di Kabupaten Soppeng dalam hal ini kantor Dinas Kabupaten soppeng, kantor Kecamatan donri-donri,TKSK. Serta instansi terkait dengan penelitian ini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman informan (Sugiyono: 2014).

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder sebagai berikut :

- a) Data Primer merupakan data yang didapatkan dari informan utama yaitu Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada perusahaan dan wawancara langsung

dengan pimpinan beserta stafnya yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b) Data Sekunder merupakan data pelengkap yang didapatkan dari informan, buku-buku, internet, yang dianggap bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah Orang yang bertanggung jawab atau yang menjalankan program Kartu Keluarga Sejahtera tersebut di Kecamatan donri-donri Kabupaten Soppeng. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah informan dan responden dari berbagai pihak. Berikut ini daftar informan penelitian:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng	1 orang
2.	TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) Donri-donri	1 orang
3.	Camat Donri-donri	1 orang
4.	Kepala Desa/Kelurahan	4 orang
5.	Masyarakat	4 orang

Tabel 3.2 Informan wawancara penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Ket
1.	Sudani Endang Suyono	SES	Sekretaris Dinas Sosial	L
2.	Fanca Putra	FP	Staf pemberdayaandinas social	L
3.	Andi Zulkifli Nurdin	AZN	Staf pemberdayaan sosial dinas sosial	L
4.	Nurdin	NN	Kepala dinas Sosial	L
5.	Andi Framadi	AF	Kepala bagian TNP2K	L
6.	Andi Anugrahbatara Mula	AAM	Sekretaris KecamatanDori-donri	L
7.	Vina Suci Rhomnadhona	VSR	Kordinator statistic kecamatan Donri-donri	P
8.	Andi Supriadi	AS	Kepala Desa Tottong	L
9.	Burhan	BN	Masyarakat	L
10.	Yusuf	YS	TKSK	L
11.	Sukri Razak	SR	Kepala desa	L
12.	Salma	SA	Staf desa	P
13.	Mustan	MN	Staf Desa	L
14.	Yasse	YS	Masyarakat	P
15.	Sumi	SM	Masyarakat	P
16.	Hasmi	HS	Masyarakat	P
17.	Dirna	DR	Masyarakat	P

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini metode tersebut sebagai penjaring data primer tentang implementasi program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman. (Miles, Huberman dalam Sugiono, 2012), mengemukakan

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction* data *display* dan *conclusion drawing* atau *verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiono, 2012).

2. Penyajian Data (*Data display*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif setelah mereduksi data adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini (Miles,Huberman Sugiono, 2012) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Miles, Huberman, dalam Sugiono, 2012).

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif model Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dilakukan verifikasi karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademik dan ilmiah. Analisis data penelitian bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Dengan menetapkan masalah penelitian, penelitian sudah melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut.

G. Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data-data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya data yang sah akan menghasilkan kesimpulan

hasil penelitian yang benar. Penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik Trianggulasi, yaitu:

1. Trianggulasi sumber, adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang di terima dari satu sumber meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber daya tersebut harus setara sederajatnya, kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan di mintakan kesempatan dengan sumber adalah untuk meguji sumber data tersebut.
2. Trianggulasi tehnik, adalah untuk menguji krebilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan tehnik observasi, maka di lakukan lagi tehnik pengumpulan data dengan tehnik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan tehnik dokumentasi.
3. Trianggulasi waktu, adalah untuk melakukan pengecekan data dengan carawawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Seperti, yang awalnya melakukan pengumpulan data pada waktu pagi hari dan data yang di dapat,tetapi mungkin saja pada waktu pagi hari tersebut kurang tepat karena mungkin informasi dalam keadaan sibuk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Soppeng

Kabupaten soppeng hadir untuk melayani rakyatnya.Maka dari itulah, pemerintah kabupaten Soppeng bertekad untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani rakyat Soppeng, sehingga bermuara pada terciptanya Kabupaten Soppeng yang lebih baik. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Soppeng yaitu:

Visi: Pemerintahan yang melayani dan lebih baik

Misi:

1. Mementapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan propetani
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara 40 06' Lintang Selatan dan 40 32' Lintang Selatan dan antara 1190 47' 18" Bujur Timur dan 1200 06' 13" Bujur Timur. Letak Kabupaten Soppeng di depresiasi Sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Dengan luas daratan 700 km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 m di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya 800 km² berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibukota kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut.

- 1). Batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Barru

- 2). Pemerintahan :

Nama Bupati/Walikota : H. A. Kaswadi Razak, S.E

Nama Wakil Bupati/ Walikota : Supriansa, S.H, M.H

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Nama Kepala Kecamatan	Luas wilayah (KM ²)	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Marioriwawo	Hadi Indra Jaya, S.STP	300	11	2	13
2.	Lalabata	ST. Kurniawati	278	3	7	10
3.	Liliriaja	Drs. Amin Saing	96	5	3	8
4.	Ganra	Muh. Idrus, S.Sos	57	4	-	4
5.	Citta	Drs. A. Muh. Tono	40	4	-	4
6.	Lilirilau	A.Dhamriah, S.Sos, MM	187	8	4	12
7.	Donri-donri	Drs. H. Fatahuddin	222	9	-	9
8.	Marioriawa	Abd. Khadir, AP	320	5	5	10
Soppeng			1500	49	21	70

Sumber: Buku Soppeng Dalam Angka tahun 2011

Tabel 4.2 jumlah penduduk Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Jumlah penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Marioriwwo	20.701	23.609	44.310
2.	Lalabata	21.287	22.982	44.269
3.	Liliriaja	12.659	14.305	26.964
4.	Ganra	5.190	6.111	11.301
5.	Citta	2.615	4.384	7.999
6.	Lilirilau	17.952	20.250	38.202
7.	Donri-donri	10.700	12.220	22.920
8.	Marioriawa	13.332	14.529	27.862
Soppeg		105.436	118.390	223.829

Sumber: Buku Soppeng Dalam Angka tahun 2011

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Dinas sosial kabupaten soppeng terletak di Jalan Salotungo, lalabata rilau, kecamatan lalabata, Kabupaten soppeng. Dinas Sosial Kabupaten Soppeng merupakan pembantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

1). Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten soppeng

Visi :Mengutamakan tanggung jawab sosial yang tinggi menuju masyarakat sejahtera

Misi :

1. Mengembangkan sistim jaminan sosial dan perlindungan sosial
2. Memperkuat ketahanan sosial dengan upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian yang serius kepada masyarakat yang belum beruntung

2). Pemerintahan :

1. Kepala Dinas : Drs. H. Nurdin, M.Si
2. Sekertaris : Drs.Sudani Endang Suyono
3. Kabid Pemberdayaan Sosial : H.A Zulkifli Nurdin, SH

3. Profil Kecamatan Donri-Donri

Donri-Donri merupakan salah satu kecamatan dari 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kecamatan Donri-Donri berbatasan langsung dengan Kecamatan Marioriawa di sebelah utara, Kabupaten Wajo di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah barat, dan Kecamatan Lalabata di sebelah selatan. Letak astronomis Kecamatan Donri-Donri yaitu antara 4006'0"-4032'0" Lintang Selatan dan antara 11904,2'18"-120006'13" Bujur Timur. Adapun luas wilayahnya 222 km². Luas wilayah tersebut merupakan 14,80 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.

Kecamatan Donri-Donri terdiri dari 9 desa definitif yaitu Desa Pesse, Pising, Labokong, Donri-Donri, Sering, Lalabatariaja, Tottong, Leworeng, dan Kessing. Desa Donri-Donri merupakan ibukota kecamatan tersebut.

1). Visi dan Misi Kecamatan Donri-donri

Visi: Merwujudnya fungsi pemerintahan yang adil, jujur, profesional dan bertanggungjawab menuju masyarakat sejahtera

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mengoptimalkan Kecamatan dan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3. mengadakan reformasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sehingga tercipta pelayanan yang prima.

2). Pemerintahan :

1. Camat : Drs. H. Fatekhuudin, M.Si
2. Sekertaris Camat : A. Anugerah Batara Mula. S.STP, M.Si
3. Kasi Kesejahteraan Rakyat : Citra Dewi, S.Sos

B. Implemetasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng)

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi seperti program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, Sebab suatu daerah bisa dikatakan sejahtera apabila daerah mampu mengurangi angka kemiskinan, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya maupun keluarganya, oleh karena itu pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui nawa citanya, pemerintah akan meningkatkan produktivitas kesejahteraan melalui program-program yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu bentuk program tersebut adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang di atur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan yang di atur dalam pasal 2 menyebutkan bahwa :

- (1). Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial.
- (2). Program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Program Simpanan keluarga Sejahtera
 - b. Program Indonesia Pintar
 - c. Program Indonesia Sehat

Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah Kabupaten Soppeng dalam percepatan penanggulangan kemiskinan menggunakan peraturan daerah provinsi

Sulawesi selatan nomor 3 tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi selatan dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan kesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

C. Kebijakan Program Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng

Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu yang di atur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Bagi keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini, akan mendapatkan kartu Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk

keuangan digital dengan pemberian *simcard* yang berisi *e-money* dalam bentuk simpanan giro pos. Setiap keluarga mendapat dana sejumlah Rp.200.000 per bulan dan kartu ini akan diisi setiap 2 bulan.

Pendistribusian KKS ini membutuhkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.

Kebijakan dapat diukur keberhasilannya dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhirnya, apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini ingin melihat pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera ini menggunakan indikator- indikator sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Tahapan pertama dalam menjalankan suatu kebijakan khususnya Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng perlu adanya Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar masyarakat dapat memahami tujuan dan sasaran dari kebijakan ini. Dalam hal ini dapat kita lihat melalui beberapa indikator perilaku hubungan organisasi antar organisasi dimensinya yaitu komitmen dan koordinasi:

1) Komitmen

Dalam tataran implementasi, komitmen adalah kesepakatan bersama dengan instansi lain terkait dalam menjaga stabilisasi organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksana program (winter 2003).

Menurut hasil wawancara dengan bapak SES di kantor Dinas Sosial mengatakan bahwa

Kami dari pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat, agar masyarakat paham mengenai program Kartu Keluarga Sejahtera ini .”(Hasil wawancara dengan Bapak SES, tanggal 16 Juni 2017).

Sementara itu, hasil wawancara dengan kepala bagian percepatan penanggulangan kemiskinan, mengatakan bahwa

“Adanya Program bantuan ini sangat membantu dalam menurunkan angka kemiskinan di masyarakat, yang jelas pemerintah daerah sekarang ini berusaha semaksimal mungkin menurunkan angka kemiskinan melalui program ini dan sosialisasi ke masyarakat sudah baik karena tujuan diadakannya sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui kebijakan ini, sasaran yang ingin dicapai sudah disosialisasikan semua ke masyarakat, semoga sosialisasi ini berjalan dengan lancar dikarenakan pemerintah daerah sudah dekat dengan masyarakat sehingga memudahkan sosialisasi”(hasil wawancara dengan bapak AF, 17 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu tentang program Kartu Keluarga tersebut, karena tujuan diadakannya sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui program kebijakan ini.

2) Koordinasi

Pada tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi. Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi. Sebab, bagaimanapun, implementasi kebijakan sifatnya rumit, dan tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar. (Suratman, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf dinas sosial di kantor dinas sosial kabupaten Soppeng yang mengatakan bahwa

“Mengenai kordinasi yang kami lakukan dengan organisasi lain seperti pihak kecamatan, TNP2K, dan lain sebagainya. Kami selalu berkordinasi ketika akan melakukan sosialisasi dan berkordinasi untuk sama-sama mencari solusi untuk mensukseskan pelaksanaan program ini agar program ini dapat berjalan baik.”(hasil wawancara dengan Ibu FRP, 16 juni 2017)

Sementara itu, hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Donri-donri terkait dengan sosialisasi program KKS , yang mengatakan bahwa

“Sebelum melakukan sosialisasi kami mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada instansi-instansi yang terkait setelah itu mengumpulkan masyarakat mengenai program bantuan sosial ini” (Hasil wawancara dengan Bapak AAM, tanggal 17 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat di simpulka bahwa koordinasi yang di lakukan lembaga terkait dengan pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera ini sudah cukup baik karena pihak Dinas terkait selalu berkordinasi dengan lembaga terkait untuk sama-sama mencari solusi untuk mensukseskan program KKS ini dapat mencapai hasil yang maksimal.

Dari hasil wawancara dari instansi-instansi yang bersangkutan dengan masyarakat Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng tersebut diatas, penuliis menarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah daerah telah berupaya dalam mensosialisasikan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri, karena sosialisasi sangat penting sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman dan mengimplementasikan program kartu keluarga sejahtera kepada masyarakat

2. Pendataan Penetapan Penerima

Suatu kebijakan atau keputusan tidak akan terlepas dari sumber informasi sebagai bahan pertimbangan, sumber informasi biasanya berupa data, keakuratan data ini sangat penting karena meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Untuk memperoleh data diperlukan proses pendataan, disinilah proses yang sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat yang nantinya menentukan penerima Kartu Keluarga Sejahtera. Dalam menentukan penerima Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri, yaitu mereka yang dinilai merupakan golongan keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I yang terdapat pada tingkat kesejahteraan keluarga.

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 indikator (BKKBN) yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Sering dikelompokkan sebagai “Sangat Misikin”) yaitu belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

- 1) Indikator Ekonomi

Makan dua kali atau lebih sehari

- 1) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, berkerja,sekolah dan bepergian)
- 2) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

2) Indikator Non-Ekonomi

- 1) Melaksanakan ibadah
- 2) Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

2. Keluarga Sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai “Miskin”) adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, meliputi:

a). Indikator Ekonomi

1. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur
2. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
3. Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni

b). Indikator Non-Ekonomi

1. Ibadah teratur
2. Sehat tiga bulan terakhir
3. Punya penghasilan tetap
4. Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup
5. Usia 6-15 tahun bersekolah
6. Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

3. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi :
 - a. Memiliki tabungan keluarga
 - b. Makan bersama sambil berkomunikasi
 - c. Mengikuti kegiatan masyarakat
 - d. Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
 - e. Meningkatkan pengetahuan agama
 - f. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
 - g. Menggunakan sarana transportasi
4. Keluarga sejahtera III adalah:
 - a. Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:
 - a). Memiliki tabungan keluarga
 - b). Makan bersama sambil berkomunikasi
 - c). Mengikuti kegiatan masyarakat
 - d). Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
 - e). Meningkatkan pengetahuan agama
 - f). Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
 - g). Menggunakan sarana transportasi
 - b. Belum dapat memenuhi beberapa indikator. meliputi :
 - a). Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
 - b). Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
5. Keluarga sejahtera III plus adalah sudah dapat memenuhi indikator meliputi :

- a). Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- b). Sebagai pengurus organisasi Kemasyarakatan.

Adapun data jumlah keluarga sejahtera berdasarkan tahapan dan data penerima Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Soppeng yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.3 jumlah keluarga sejahtera berdasarkan tahapan di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Tahapan Keluarga					Total
		Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III ⁺	
1.	Marioriwawo	46	325	3583	6058	1001	11013
2.	Lalabata	150	1468	2933	6998	676	122114
3.	Liliriaja	10	1413	3151	2645	314	7533
4.	Ganra	6	661	1021	1584	267	3539
5.	Citta	13	137	724	1368	30	2272
6.	Lilirilau	84	2051	5855	3847	420	12257
7.	Donri-donri	303	1405	1838	2827	610	6983
8.	Marioriawa	37	1686	3489	2579	380	8171

Sumber: BPS 2017

Tabel 4.4 Jumlah penerima KSS di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Jumlah Penerima	%
1.	Marioriwawo	174	46,9
2.	Lalabata	163	10,1
3.	Liliriaja	1703	
4.	Ganra	662	99,30
5.	Citta	60	40
6.	Lilirilau	1808	84,7
7.	Donri-donri	1657	97
8.	Marioriawa	2311	
Total		8538	87,2

Sumber: Dinsos Kab.Soppeng 2017

Berdasarkan data tersebut di atas, terkhusus di Kecamatan Donri-donri penerima KKS berjumlah 1657 yang tersebar ke 9 kelurahan/desa. Berikut data jumlah keluarga sejahtera berdasarkan tahapan dan data penerima Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.5 jumlah keluarga sejahtera berdasarkan tahapan di Kecamatan Donri-donri

No	Desa/ kelurahan	Tahapan Keluarga					Total
		Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III ⁺	
1.	Donri-donri	21	112	227	367	92	819
2.	Kessing	20	157	211	354	82	824
3.	Labokong	24	137	204	350	80	795
4.	Lalabata riaja	38	153	197	265	64	717
5.	Leworeng	23	108	224	361	86	802
6.	Pesse	66	228	189	282	52	817
7.	Pising	37	178	173	254	50	692
8.	Sering	49	187	190	249	46	721
9.	Tottong	25	145	223	345	58	796

Sumber : petugas lapangan kecamatan Donri-donri

Tabel 4.6 Jumlah penerima KKS di Kecamatan Donri-donri

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penerima	%
1.	Donri-donri	126	94,8
2.	Kessing	168	95
3.	Labokong	156	96,9
4.	Lalabata Riaja	191	100
5.	Leworeng	125	95,5
6.	Pesse	294	100
7.	Pising	209	97,3
8.	Sering	227	96,2
9.	Tottong	161	94,8
Total		1657	97

Sumber: Kecamatan Donri-donri 2017

Berdasarkan tabel tersebut di atas jumlah penerima KKS khususnya di Kecamatan Donri-donri sebanyak 1657 KKS sedangkan dari jumlah Prasejahtera dan Sejahtera I di Kecamatan Donri-donri jika di totalkan terdapat 1708 sehingga dapat di simpulkan bahwa program KKS tersebut belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang tergolong miskin tersebut karena masih terdapat beberapa masyarakat yang tergolong miskin belum menerima manfaat dari program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Donri-donri mengatakan bahwa

“Sebenarnya bukan TKSK yang melakukan pendataan tetapi data yang digunakan berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) merupakan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Seharusnya BPS dalam proses mendata terkait bantuan sosial ini, harusnya melakukan verifikasi pendataan 6 bulan sekali karena

kemiskinan itu relatif, jadi bukan TKSK yang melakukan pendataan melainkan hanya mendampingi agar program ini terlaksana dengan baik di tiap Kecamatan”.(hasil wawancara dengan Bapak YS, tanggal 17 Juni 2017)

Sementara itu, hasil wawancara penulis dengan pelaksana tugas koordinator statistik Kecamatan Donri-donri mengatakan bahwa :

“Kami disini memang sebagai petugas pendata tapi kami hanya mengumpulkan, mengelolah, dan menyajikan data kepada instansi-instansi pembuat kebijakan.Cuma kebanyakan data kami yang dipakai pemerintah untuk menentukan kebijakannya”. (hasil wawancara dengan Ibu VSR, tanggal 17 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pendataan program kartu keluarga sejahtera, data yang digunakan merupakan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) selaku bagian pendataan hanya menyediakan data kepada instansi-instansi pembuat kebijakan, sedangkan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya melakukan pendampingan agar program bantuan sosial ini terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain data tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan dalam pendataan penerima Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri dapat dilihat melalui indikator perilaku hubungan organisasi antar organisasi yang dimensinya yaitu komitmen dan koordinasi:

1). Komitmen

Komitmen adalah kesepakatan bersama dengan instansi lain terkait dalam menjaga stabilisasi organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam menjalankan sebuah program.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Subbagian Tata Usaha BPS mengatakan bahwa

“Agar program bantuan sosial ini berjalan sesuai harapan, kami akan berusaha untuk mengadakan pendataan ulang kembali di masyarakat, dan melakukan semaksimal mungkin.” (hasil wawancara dengan ibu AIF, 17 Juni 2017)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan koordinator statistik kecamatan mengatakan bahwa

“Kami berkomitmen untuk memperbaiki dan lebih teliti lagi untuk melakukan pendataan agar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang timbul agar semua masyarakat yang memang benar-benar berhak menerima, mendapatkan program bantuan social ini”.(hasil wawancara dengan Ibu VSR, 17 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat di simpulka bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pendataan ulang dan akan berusaha semaksimal mungkin agara segala kesalahan yang pernah terjadi tidak akan terjadi kembali sehingga dapat bermanfaat baik bagi penerima bantuan ini.

2). Koordinasi

Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi. Sebab, bagaimanapun, implementasi kebijakan sifatnya rumit, dan

tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar sehingga diperluka adanya koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah seorang staf dinas sosial di kantor dinas sosial kabupaten Soppeng yang mengatakan bahwa

“Kami selaku pemerintah daerah yang bertanggung jawab dengan program sosial di kabupaten Soppeng telah mengkoordinasikan kepada TNP2K dan BPS untuk melakukan verifikasi data ulang karena terkait adanya penyampaian dari masyarakat bahwa terdapat banyak kesalahan dengan program ini”.(hasil wawancara dengan Ibu FRP, 16 juni 2017)

Sementara itu, hasil wawancara dengan kepala bagian percepatan penanggulangan kemiskinan, mengatakan bahwa

“Iya, sudah dikoordinasikan kepada kami untuk melakukan verifikasi data ulang dan kami juga sudah menyampaikan hal tersebut ke BPS untuk melakukan pendataan ulang masyarakat”.(hasil wawancara dengan bapak AF, 17 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas pemerintah setempat telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi data ulang dan mengadakan pendataan ulang agar semua masyarakat yang pantas mendapatkan program bantuan ini bisa mendapatkan semua. Namun disisi lain meskipun telah dilakukan pendataan masih terdapat kesalahan yang terjadi.

Berdasar hasil wawancara penulis dengan staf desa di kecamatan Donri-donri mengatakan bahwa

“Iya memang benar sudah dilakukan pendataan ulang, namun saya lihat masih terdapat kesalahan karena ada beberapa orang warga disini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu namun masih ada di daftar penerima, namun kami

sudah melaporkan hal tersebut.”(hasil wawancara dengan Bapak MA, 18 Juni 2017).

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendataan yang dilakukan dalam program Kartu Keluarga Sejahtera masih kurang efektif karena masih terdapat kesalahan yang ditemukan dikarenakan mereka masih menggunakan data lama yaitu data hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Namun mereka telah melakukan perbaikan ulang tetapi masih terdapat kesalahan, sehingga penerima KKS ini belum merata dikarenakan pendataannya yang kurang efektif.

3. Pengawasan

Pengawasan itu merujuk pada kegiatan secara cermat dan teliti baik itu melalui evaluasi atau tindakan korektif guna memastikan apakah tujuan telah tercapai serta berupaya menghindari penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi dengan menggunakan indikator yaitu:

1). Komitmen

Dalam tataran implementasi, komitmen adalah kesepakatan bersama dengan instansi lain terkait dalam menjaga stabilisasi organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksana program (winter 2003).

Hasil wawancara yang disampaikan oleh petugas TKSK Kecamatan Donri-donri mengatakan bahwa

“Kami sangat mendukung program bantuan sosial ini, untuk itu, saya selaku petugas kesejahteraan sosial akan senantiasa berantusias untuk mengawasi berjalannya program KKS ini agar benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak menerima bantuan ini dan mengharapkan kepada pihak kelurahan/desa untuk bekerjasama dalam mengawasi program KKS ini.” (hasil wawancara dengan Bapak YS, tanggal 17 Juni 2017).

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf desa di kecamatan Donri-donri mengatakan bahwa

“Kami juga sangat mendukung dengan adanya program ini dan akan semaksimal mungkin untuk membantu TKSK untuk melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat dan kami mengimbau kepada masyarakat agar menyampaikan kepada kami ketika ada kesalahan terkait kartunya.” (hasil wawancara dengan Bapak MN, tanggal, 18 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat telah berkomitmen dalam hal melakukan pengawasan terkait Kartu Keluarga Sejahtera ini dan sangat berantusias untuk mengawasi program bantuan sosial ini, agar tepat sasaran dan masyarakat yang berhak menerima bantuan ini dapat merasakan manfaatnya.

2). Koordinasi

Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi. Sebab, bagaimanapun, implementasi kebijakan sifatnya rumit, dan tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar sehingga diperlukan adanya koordinasi

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa.

“Kami selalu berkomitmen dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan pengawasan agar program ini berjaan dengan baik, kami telah mengkordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mengawasi dan sebisa mungkin mengontrol setiap bulan agar kita bisa melihat berhasil atau tidaknya program tersebut dan ketika ada kekurangan sebisa mungkin untuk segera mengatasinya”.(hasil wawancara dengan Bapak NN, 16 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan terkait Kartu Keluarga Sejahtera ini udah cukup baik, mereka selalu berusaha untuk melakukan pengawasan dan telah mengkordinasikannya untuk sebisa mungkin melakukan kontrol setiap bulannya agar mereka dapat sesegera mungkin mengatasi ketika ada kesalahan yang timbul.

Dari hasil wawancara dari instansi-instansi yang bersangkutan dengan KKS di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng tersebut diatas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah daerah telah berupaya melakukan pengawasan dengan baik agar program bantuan sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah daerah telah berupaya dalam mensosialisasikan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-donri, karena sosialisasi sangat penting sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman dan mengimplementasikan program kartu keluarga sejahtera kepada masyarakat.
2. Pendataan yang dilakukan dalam program Kartu Keluarga Sejahtera masih kurang efektif karena masih terdapat kesalahan yang ditemukan dikarenakan mereka masih menggunakan data lama yaitu data hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Namun mereka telah melakukan perbaikan ulang tetapi masih terdapat kesalahan, sehingga penerima KKS ini belum merata dikarenakan pendataannya yang kurang efektif.
3. Pemerintah setempat telah berupaya melakukan pengawasan dengan baik agar program bantuan sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dikemukakan beberapa saran :

1. Diharapkan kepada pemerintah agar memperhatikan warga masyarakat yang tergolong miskin tersebut yang belum mendapatkan program ini agar semua masyarakat yang tergolong miskin bisa mendapatkannya dan bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi khususnya di kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng
2. Diharapkan kepada warga masyarakat peserta program Kartu Keluarga Sejahtera supaya menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan jika ada keluhan mengenai program ini agar segera melaporkan untuk dicarikan solusinya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Sahri Ani, disapa Ani. Lahir pada tanggal,13 November 1993 Desa Leworeeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Anak ke tiga dari pasangan Suami istri Baharuddin dan Nursiah, penulis menempuh pendidikan pertama selama enam tahun di SDN 44 Sekkanyili Desa Leworeng Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Leworeng Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kesekolah menengah atas di SMA Negeri 2 WatanSoppeng Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Sahri Ani, disapa Ani. Lahir pada tanggal,13 November 1993 Desa Leworeeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Anak ke tiga dari pasangan Suami istri Baharuddin dan Nursiah, penulis menempuh pendidikan pertama selama enam tahun di SDN 44 Sekkanyili Desa Leworeng Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Leworeng Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kesekolah menengah atas di SMA Negeri 2 WatanSoppeng Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.